

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Sebagai negara berkembang yang mempunyai sejuta kelebihan disektor sumber daya alam (SDA) seharusnya membuat Indonesia mudah mencapai julukan Negara maju. Akan tetapi, pada kenyataanya istilah tersebut belum dapat disandang oleh Indonesia, karena beberapa hal diantaranya ingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya angka kemiskinan, dan rendahnya serta belum meratanya pendidikan berkualitas.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam membangun dan meningkatkan perekonomian bangsa tersebut. Pemenuhan akan pendidikan berkualitas menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat yang menempati suatu Negara. Sayangnya, Indonesia belum dapat mewujudkan hal tersebut. Masih banyak warga negaranya belum dapat mengakses pendidikan terutama masyarakat golongan menengah kebawah atau mereka yang tinggal jauh dari hiruk pikuk ibukota Jakarta. Padahal pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi atau sumber daya berkualitas guna kepentingan masa depan bangsa. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas bangsa ini tidak akan mempunyai daya saing yang mengakibatkan terpuruk dalam persaingan dunia. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat diperoleh dengan dengan cara memberikan pendidikan terbaik untuk masyarakatnya.

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹

Pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan luas, Sehingga mudah muncul berbagai masalah yang penyelesaiannya membutuhkan waktu cukup panjang. Diantaranya : kualitas pendidikan yang memprihatinkan, tidak liniernya dunia pendidikan dan dunia kerja, akses pendidikan berkualitas yang belum merata, angka putus sekolah yang tinggi, rendahnya kesadaran bahwa pendidikan itu penting, kemiskinan, dan kurikulum yang sering berganti serta Sumber daya manusia yang bergerak dibidang pendidikan kurang berkualitas.

Kualitas pendidikan di Indonesia dapat dikatakan memprihatinkan. UNESCO (2000) mengeluarkan data tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasialan perkepala terus mengalami penurunan. Tahun 1996 Indonesia menempati peringkat ke 102 dari 174 negara. Dan ditahun 1999 indonesia berada diurutan 109. Political and Economic Risk Consultant

1 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(PERC) mengeluarkan hasil survey, kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi ini berada di bawah Vietnam. The World Economic Forum Swedia (2000) melaporkan, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya berada di urutan 37 dari 57 negara di dunia yang disurvei.²

Ketidakliniernya dunia pendidikan dan dunia kerja menyebabkan para Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat bersaing di dunia kerja karena kualitas SDM yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau kebutuhan pasar. Akhirnya menimbulkan persepsi bahwa SDM Indonesia rendah. Akibat jauh dari ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja adalah pengangguran dan sumber daya alam Indonesia yang melimpah tidak dikelola dengan baik oleh generasinya.

Dalam rangka pengembangan bidang pendidikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu :³

1. Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun

Program Wajib Belajar 9 tahun adalah salah satu program dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program WAJAR atau wajib belajar Sembilan tahun ini sudah direncanakan sejak 2 Mei 1994. Akan tetapi baru terlaksana setelah dikeluarkannya Peraturan

² <https://republika.co.id/berita/pendidikan/education/17/05/03/opchjr354-ini-tujuh-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-jppi> pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 20.00

³ Habullah, M, Haji. *Kebijakan pendidikan : dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2015 hal 153

Pemerintah No 47 Tahun 2008. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berusia 7-15 tahun dan diharapkan program ini dapat menjangkau masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), masyarakat yang belum sadar akan pendidikan, keluarga kurang mampu, masyarakat yang dilanda konflik, dan anak-anak penyandang cacat.

Dari program ini, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan dasar esensial sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi sebagai bekal menghadapi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Kebijakan Ujian Nasional

Kebijakan Ujian Nasional (UN) adalah istilah untuk penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama serta menengah atas. UN untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 2003. Tujuan program ini adalah peningkatan kualitas dan standarisasi nasional.

3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru

Salah satu penyebab pendidikan di Indonesia berkualitas rendah karena kualitas guru atau tenaga pengajar berada dibawah standart. Hal tersebut disebabkan karena memang latar belakang pendidikannya, fasilitas mengajarnya, dan yang berhubungan dengan metodologi serta pengawasan pembelajarannya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan langkah-langkah penanggulangan diantaranya Kesempatan

melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, Inhouse training dan pelatihan-pelatihan khusus, Penyetaraan, dual mode system, dan mengintensifkan kegiatan-kegiatan guru seperti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajar) dan KKG (Kelompok Kerja Guru).

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan sebuah harapan baru bagi dunia pendidikan. Karena didalamnya Guru dan Dosen dituntut memiliki sertifikat sebagai guru profesional yang mana dampak jauh dari hal tersebut adalah tumbuhnya kesadaran untuk meningkatkan kualitasnya agar dapat menaklukkan tantangan pendidikan yang semakin beragam.

4. Kebijakan Kurikulum 2013

Salah satu cara pemerintah dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia adalah dengan menerapkan kurikulum 2013. Kebijakan ini dilandasi oleh peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014, dan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

5. Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah membawa perubahan dibidang pendidikan karena pada awalnya kewenangan ini berada ditangan pusat dan saat ini berada ditangan pemerintah daerah sampai pada tangan lembaga pendidikan sekolah.

Seiring dengan berjalannya kebijakan otonomi daerah, dalam pembangunan pendidikan juga terdapat beberapa kebijakan yang berkaitan dengan Otonomi dan Desentralisasi pendidikan, yaitu :⁴

1) Kebijakan Mutu

Kebijakan yang terkait dengan mutu pendidikan, adalah :

- a. Peningkatan mutu tenaga kependidikan, melalui program pengembangan seperti magang, pencangkakan, dan pemberdayaan SDM.
- b. Penetapan consensus standar kompetensi pendidikan nasional, yaitu sejauh mana siswa seharusnya menguasai suatu pengetahuan dan keterampilan.
- c. Penetapan standar mutu pendidikan nasional melalui consensus.
- d. Peningkatan upaya pencapaian standar mutu global.
- e. Pemenuhan kebutuhan sarana (buku dan peralatan sekolah).
- f. Pemenuhan biaya operasional dan perawatan.
- g. Pemenuhan perangkat penyelenggaraan pendidikan dan SDMnya.
- h. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan.
- i. Pemenuhan kesejahteraan tenaga kependidikan.
- j. Pemenuhan kebutuhan pokok makanan dan kesehatan siswa.

⁴ Habullah, M, Haji. *Kebijakan pendidikan : dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2015 hal 173

- k. Penetapan standar pelayanan minimal yang harus diberikan atau dibiayai oleh daerah dalam setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang disertai dengan indicator kinerjanya.

2) Kebijakan Relevansi

Kebijakan yang berkaitan dengan relevansi pendidikan, antara lain :

- a. Adanya upaya nasion character building, misalnya dengan adanya kurikulum nasional dan kurikulum daerah.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah dan pelaksanaan pendidikan.
- c. Peningkatan layanan pendidikan kepada siswa “khusus”.
- d. Penerapan pengembangan kurikulum berbasis masyarakat.
- e. Menuju pengembangan kurikulum berbasis sekolah.

3) Kebijakan Efisiensi

Kebijakan berkaitan efisiensi pendidikan, antara lain adalah Pengelolaan pendidikan berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk lain dari program desentralisasi dalam bidang pendidikan.

Dalam manajemen berbasis sekolah, wewenang pengambilan keputusan dipandangan sebagai otonomi ditingkat sekola dalam pemberdayaan sumber-sumber sehingga sekolah mampu secara mandiri manggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan dan mepertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Manajemen berbasis sekolah pada

prinsipnya memberikan suatu otonomi atau kewenangan yang bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik.

4) Kebijakan Pemerataan.

Kebijakan yang terkait dengan pemerataan pendidikan, antara lain :

- a. Peningkatan pemerataan pendidikan dasar.
- b. Peningkatan angka partisipasi murni.
- c. Pengurangan siswa putus sekolah.
- d. Pemenuhan kebutuhan prasarana.
- e. Penerapan pendidikan yang berkeadilan, pendidikan untuk semua tanpa ada diskriminasi.
- f. Alokasi dan distribusi anggaran pendidikan yang harus menjunjung tinggi asas keadilan dengan menerapkan formula pendidikan yang adil dan transparan.
- g. Penyediaan dana alokasi khusus untuk memberikan bantuan pendidikan melalui jalur pendidikan alternative bagi anak-anak yang kurang beruntung, cacat dan lambat belajar.

5) Kebijakan Kurikulum

Kurikulum pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa di kesampingkan dalam upaya membangun pendidikan yang berkualitas. Penerapan kurikulum dengan memperhatikan perkembangan yang ada setidaknya mampu membawa pendidikan dapat beradaptasi dengan berbagai kemajuan yang ada.

Kebijakan yang terkait dengan kurikulum pendidikan, antara lain :

- a. Kurikulum yang memadukan kepentingan nasional dan kepentingan local, serta kurikulum nasional dan kurikulum daerah yang seimbang.
- b. Untuk kurikulum pengajaran agama, peraturan perUndang-Undangan secara sentral dan operational, yang secara langsung menyangkut kurikulum, pengaturan guru, serta standar minimal yang harus dipenuhi.
- c. Penerapan kurikulum berbasis kemampuan standart untuk kurikulum yang bersifat nasional.
- d. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi untuk kurikulum daerah.
- e. Pengembangan kurikulum berbasis masyarakat.
- f. Manuju pengembang kurikulum berbasis sekolah.

Dengan penerapan kurikulum 2013 sekarang memberi nuansa baru untuk daerah agar mampu berkreasi, karena didalamnya sudah diatur berbagai aturan main yang memberikan kesempatan sekolah untuk dapat lebih berkembang.

Sejalan Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan, beberapa daerah telah menerapkan kebijakan ini, seperti Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bengkalis, Kota Palembang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bojonegoro, Kota Malang, Kabupaten Mompawah, Kabupaten Maros, Kabupaten Jembrana,

Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kupang, dan Kota Pare-Pare Kabupaten Bulukumba, Kota Mamuju, dan Kota Blitar.

Kabupaten lain yang ikut serta memanfaatkan kebijakan otonomi dan desentralisasi pendidikan adalah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Pada masa bupati Bustami Zaenudin telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Calon Mahasiswa Program Diploma III Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Program ini sebagai salah satu cara untuk mewujudkan visi, misi dan slogan Kab Way Kanan, yaitu “Bumi Petani” dan “Mulang Tiyuh”. Slogan ini bertujuan untuk meningkatkan sector unggulan daerah yaitu bidang pertanian dan perkebunan melalui Sember Daya Manusia (SDM) asli bumi petani. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, sebanyak 406.735 jiwa, 80 persen adalah petani.

Slogan "Bumi Petani", dan ajakan "Mulang Tiyuh" sejalan dengan keberadaan petani dan pekebun yang dominan di daerah ini, sekaligus ajakan untuk mengusahakan semaksimal mungkin pengelolaan potensi lahan yang tersedia agar menjadi produktif dan optimal. Sehingga akan Membuat Kab Way Kanan Provinsi Lampung menjadi daerah yang kaya dan maju di Indonesia.

Akan tetapi, persoalan muncul ketika masa jabatan bupati way kanan saat itu pada tahun 2012 Bustami Zaenidun digantikan oleh Raden Adipati Surya pada tahun 2015. Program yang dimulai dari tahun 2012 kemudian diakhiri pada tahun 2015 bersamaan dengan pergantian jabatan bupati. Atas dasar latar belakang masalah diatas mendorong penulis untuk memilih judul “IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN NO 21 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN DIPLOMA III PERKEBUNAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2012-2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan No 21 Tahun 2012 Tentang Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Diploma III Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2012-2015?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan diberhentikannya Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan No 21 Tahun 2012 Tentang Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Diploma III Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2012-2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan No 21 Tahun 2012 Tentang

Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Diploma III Perkebunan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2012-2015

2. Mengetahui dan Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan diberhentikannya Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan No 21 Tahun 2012 Tentang Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Diploma III Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2012-2015.

3.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi perbandingan dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut implelementasi kebijakan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan dalam melakukan kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendidikan.

E. Kerangka Dasar Teori

A.1 Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti Negara/kota, bahasa latin yaitu politia berarti negara, dan bahasa Inggris yaitu policie yang menunjuk pada masalah yang berhubungan dengan masalah Publik dan Administrasi pemerintahan. Sedangkan Publik berasal dari bahasa Inggris yaitu publik berarti umum, masyarakat atau negara.

Kebijakan publik menurut Winarno adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dan aktor-aktor bukan oleh pemerintah.⁵ Dari pengertian tersebut menunjukkan tiga hal berikut :

- 1) Kebijakan tidak semata-mata dipengaruhi atau didominasi oleh kepentingan pemerintah.
- 2) Aspirasi dari aktor-aktor diluar pemerintah harus diperhatikan.
- 3) Pengkajian faktor-faktor yang berpengaruh.

Kebijakan publik menurut W.I. Jenkins (1978) adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-

⁵ Mudani, M & banarwi. *Kebijakan publik dibidang pendidikan*. Jakarta: Ar-ruzz media. 2011 hal 17

keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.⁶

Sedangkan kebijakan publik menurut Chief J. O. Udoji (1981) adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.⁷

Dan menurut Lemieux (1995) kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.⁸

Sedangkan menurut Wiliiam N. Dunn (2003:132), Kebijakan Publik adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.⁹

Menurut Prof.D.H. Solichin Abdul Wahab,M.A ciri-ciri kebijakan publik adalah :¹⁰

6 Abdul Wahab, Solichin. *Analisa kebijakan publik : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : Bumi Angkasa. 2015 hal 15

7 Abdul Wahab, Solichin. *Analisa kebijakan publik : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : Bumi Angkasa. 2015 hal 15

8 Abdul Wahab, Solichin. *Analisa kebijakan publik : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : Bumi Angkasa. 2015 hal 15

9 Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2003

10 Abdul Wahab, Solichin. *Analisa kebijakan publik : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : Bumi Angkasa. 2015 hal 17

- a. Kebijakan publik adalah tindakan yang sengaja direncanakan dan terarah pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dan berpola, terarah pada tujuan tertentu yang diputuskan bersama oleh pemerintah bukan hasil keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan dilanjutkan atau diikuti oleh tindakan-tindakan konkrit.
- d. Kebijakan publik dapat bersifat positif dan bersifat negative. Dalam bentuk yang positif, kebijakan publik akan mencakup beberapa tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dan dalam bentuk yang negative, meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak bertindak dalam masalah-masalah yang sebenarnya peran pemerintah sangat dibutuhkan.

Tujuan dari kebijakan publik adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
- b. Melindungi hak-hak masyarakat
- c. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
- d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat

11 <http://www.artikelsiana.com/2015/11/kebijakan-publik-pengertian-contoh-ciri.html>
pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 16.30

Memahami hakikat kebijakn publik sebagai jenis tindakan yang terarah pada tujuan dapat dipermudah dengan menggolongkan dalam berbagai kategori, yaitu :¹²

- a. Tuntutan kebijakan (policy demands), adalah tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik eksternal (swasta) maupun internal, dalam system politik untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. Tuntutan ini bervariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu sampai usulan agar mengambil tindakan konkret terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.
- b. Keputusan kebijakan (policy decisions), adalah keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh pejabat pemerintah untuk memberikan legitimasi/ keabsahan kewenangan atau menentukan arah terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam hal ini, termasuk keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), mengeluarkan perintah-perintah eksekutif (keputusan presiden), ketetapan-ketetapan, atau membuat penafsiran terhadap Undang-Undang.
- c. Pernyataan kebijakan (policy statements), adalah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan tertentu. Seperti, ketetapan-ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden,

12 Abdul Wahab, Solichin. *Analisa kebijakan publik : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : Bumi Angkasa. 2015 hal 24

keputusan peradilan, peraturan-peraturan administrative, pernyataan dan pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat serta tujuan pemerintah, dan tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

- d. Keluaran kebijakan (policy outputs), adalah wujud kebijakan publik yang paling konkrit. Artinya, dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, karena menyangkut hal-hal yang dilakukan untuk merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini adalah apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah bukan apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes), adalah akibat-akibat atau dampak secara langsung yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan (intended) ataupun yang tidak diharapkan (unintended) sebagai konsekuensi nyata dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah tertentu yang ada didalam masyarakat.

Kebijakan publik menurut wahab secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu :¹³

¹³ Alamsyah, Syahrul skripsi: "*analisis implementasi kebijakan program pendidikan Gratis di desa bontotanga kec. Bontotiro kab. Bulukumba*"(universitas islam negeri alauddin Makassar 2013) hal. 17

a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum/mendasar. Sesuai dengan Undang-Undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Per Undang-Undangan pasal hirarkinya yaitu:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah

b. Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) atau penjabar pelaksanaan, dimana kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama antara Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

c. Kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota.

Menurut Arif Rahman, Kebijakan publik dapat diklasifikasikan kedalam tiga macam, yaitu :¹⁴

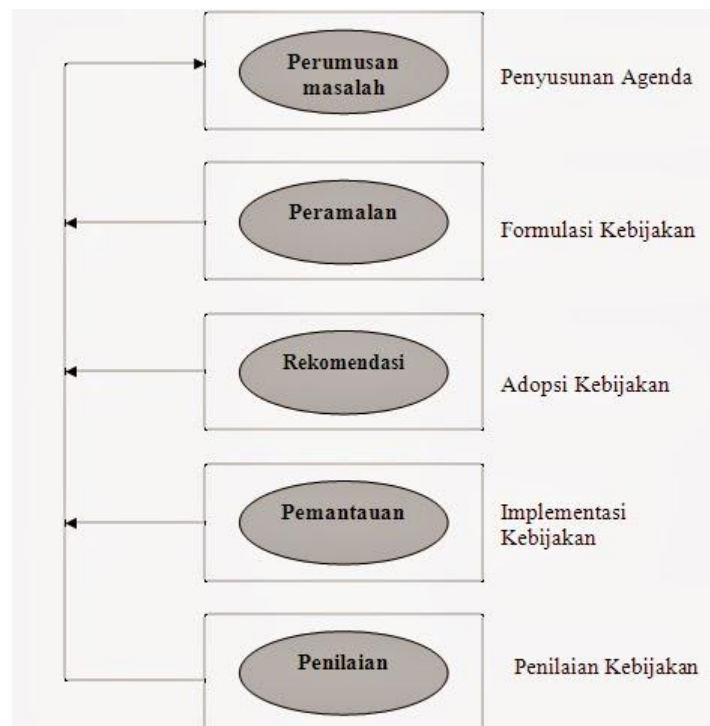
a. Kebijakan dalam alokasi dan distribusi sumber, adalah pembagian sumber sumber baik yang bersifat material-jasmaniah ataupun yang

14 Rahmad, Arif. *Kebijakan pendidikan pendidikan : analisa dinamikan formulasi dan implementas*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2010. Hal 77

bersifat spiritual-rokhaniah, dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Seperti pendidikan, keamanan, dan kesehatan.

- b. Kebijakan dalam penyerapan sumber material dan manusiawi. Kebijakan publik yang menyangkut penyerapan sumber material antara lain berupa penetapan pajak, pengelolaan barang-barang tambang, pengelolaan hasil hutan dan perkebunan. Sedangkan kebijakan publik yang menyangkut penyerapan sumber manusiawi adalah seleksi dan pengangkatan serta penempatan tenaga kerja, pegawai Negeri, tenaga ahli, dll.
- c. Kebijakan dalam hal pengaturan perilaku. Kebijakan publik yang menyangkut pengaturan perilaku masyarakat, organisasi, pejabat pemerintah, pada dasarnya adalah kebijakan publik yang bersifat regulative. Keputusan ini mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat, hubungan antar organisasi kemasyarakatan, serta cara kerja aparatur Negara.

Proses pembuatannya kebijakan publik membutuhkan tahapan yang cukup panjang. Tahapan-tahapan menurut Winarno : 2005 & Dunn : 2003 tersebut, adalah :



Sumber : <http://2.bp.blogspot.com/>

- 1) Penyusunan agenda (Agenda Setting) yaitu suatu proses masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (Policy Formulation) adalah proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
- 3) Adopsi kebijakan dan Pembuatan kebijakan (Decision making) adalah proses ketika pemerintah membuat pilihan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan guna membuat kebijakan.
- 4) Implementasi kebijakan (Policy Implementation) yaitu proses melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil yang maksimal.

- 5) Penilaian kebijakan (Evaluasi) yaitu proses menilai hasil atau kinerja kebijakan yang telah dibuat.

Dan harus memperhatikan tiga hal pokok, yaitu :

1. Pemerintah.
2. Aktor-aktor diluar pemerintah.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan.

A.2 Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan menurut Alisyahbana (2000) adalah keputusan bersama yang diambil oleh pemerintah dan akto-aktor diluar pemerintah dan memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi untuk diimplementasikan atau tidak pada bidang pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan pendidikan menurut Devine (2007) memiliki empat dimensi pokok, yaitu :¹⁵

- 1) Dimensi Normative, terdiri dari nilai, standart, dan filsafah yang memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada.
- 2) Dimensi Struktual, menyangkut pada ukuran pemerintah (desentralisasi, sentralisasi, federal, atau bentuk lain), dan struktur organisasi, metode dan prosedur yang mendukung serta menegaskan kebijakan dibidang pendidikan.

¹⁵ Mudani, M & banarwi. *Kebijakan publik dibidang pendidikan*. Jakarta: Ar-ruzz media. 2011 hal 19

- 3) Dimensi Konstituentif, terdiri atas individu, kelompok kepentingan, dan aktor yang menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.
- 4) Dimensi Teknik, menggabungkan antara pengembangan, praktik, penilaian, dan implementasi dari pembuatan kebijakan di bidang pendidikan.

Kebijakan publik di bidang pendidikan mencakup :¹⁶

- 1) Anggaran pendidikan.
- 2) Kurikulum pendidikan.
- 3) Rekrutmen tenaga pendidikan.
- 4) Pengembangan profesional staf.
- 5) Tanah dan bangunan pendidikan.
- 6) Pengelolaan sumber daya pendidikan.
- 7) Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Komponen-komponen kebijakan pendidikan, harus mencakup lima hal. Yaitu :¹⁷

- 1) Tujuan (Goal), yaitu apa yang hendak dicapai oleh kebijakan pendidikan.
- 2) Rencana (Plan), yaitu pengertian yang spesifik dan operational guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

16 Mudani, M & banarwi. Kebijakan publik di bidang pendidikan. Jakarta: Ar-ruzz media. 2011 hal 19

17 Rahmad, Arif. *Kebijakan pendidikan pendidikan : analisa dinamikan formulasi dan implementas*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2010. Hal 94

- 3) Program (Programme), yaitu upaya atau cara-cara dari yang berwenang untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) Keputusan (Decision), adalah segenap tindakan yang menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- 5) Dampak (Effect), adalah akibat-akibat yang disebabkan dari kebijakan pendidikan baik yang positif atau negative, dan sengaja maupun tidak.

Terdapat dua pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan menurut Arif Rahman, yaitu :¹⁸

- 1) Social Demand Approach, adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasar dari oada aspirasi, tuntutan, serta berbagai kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Dengan pendekatan jenis ini, para pengambil keputusan kebijakan akan melakukan penyelaman dan pendeketsian terlebih dahulu terhadap aspirasi yang berkembang dimasyarakat sebelum merumuskan kebijakan pendidikan. Bahkan tindakan hearing dan mengumpulkan semua aspirasi dari bawah secara langsung.
- 2) Man Power Approach. Pendekatan jenis ini, menitik beratkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan

¹⁸ Rahmad, Arif. *Kebijakan pendidikan pendidikan : analisa dinamikan formulasi dan implementas*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2010. Hal 90

berkualitas dimasyarakat. Pendekatan Man Power Approach, tidak melihat apa yang menjadi permintaan dari masyarakat tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan.

Teori perumusan kebijakan pendidikan dikelompokkan menjadi 5 oleh Husdon. Yaitu :¹⁹

- 1) Teori Radikal, menekankan pada kebebasan lembaga local dalam menyusun sebuah kebijakan pendidikan. Semua kebijakan pendidikan yang menyangkut penyelenggaraan dan perbaikan penyelenggaraan pendidikan ditingkat daerah diserahkan kepada daerah.
- 2) Teori Advokasi, mendasarkan pada argumenasi yang rasional, logis, dan bernilai. Sehingga dalam hal ini pemerintah pusat sangat perlu menyusun kebijakan pendidikan yang bersifat nasional demi kepentingan umum, serta demi melindungi lembaga-lembaga dan organ-organ pendidikan yang relative masih marginal dibanding lembaga pendidikan lain yang sudah maju.
- 3) Teori Transaktif, menekankan bahwa perumusan kebijakan sangat perlu didiskusikan secara bersama terlebih dahulu dengan semua pihak. Proses pendiskusian ini perlu melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak terkait, termasuk dalam hal ini adalah dengan personalia lembaga pendidikan ditingkat local. Hasil dari proses

¹⁹ Rahmad, Arif. *Kebijakan pendidikan pendidikan : analisa dinamikan formulasi dan implementas*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2010. Hal 99

diskusi tersebut kemudian diubah secara perlahan lahan. Pada dasarnya teori transaktif ini sangat menekankan harkat individu serta menjunjung tinggi kepentingan masing-masing pribadi. Keinginan, kebutuhan dan nilai-nilai individu diteliti satu per satu dan diajak bersama dalam perumusan kebijakan pendidikan.

- 4) Teori Sinoptik, menekankan bahwa dalam menyusun sebuah kebijakan supaya menggunakan metode berfikir sistematis. Obyek yang dirancang dan terkena kebijakan, dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dengan tujuan yang sering disebut misi. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori system atau teori pendekatan system rasional atau teori rasional komprehensi.
- 5) Teori Incremental, adalah teori yang menekankan pada perumusan kebijakan pendidikan yang berjangka pendek serta berusaha menghindari perencanaan kebijakan yang berjangka panjang. Penekanan semacam ini, diambil karena disebabkan masalah-masalah yang dihadapi serta performa dari para personalia pelaksana kebijakan dan kelompok yang terkena kebijakan sulit diprediksi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan pendidikan diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut :²⁰

²⁰ <https://www.rijal09.com/2016/03/kebijakan-pendidikan.html> pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 21.00

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- 2) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- 3) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional.
- 4) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- 5) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.

- 6) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.
- 8) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

A.3 Implementasi Kebijakan

Secara umum, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Webster, merumuskan bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practicia effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus

disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan adalah proses menjalankan keputusan kebijakan yang biasanya berupa Undang-Undang, perintah presiden, peraturan menteri peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan lain-lain.²¹

Sedangkan menurut Van Mater dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan.²²

Dan menurut Charles O. Jhones, implementasi kebijakan adalah suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.

21Abdul Wahab, Solichin. *Analisa kebijakan publik : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : Bumi Angkasa. 2015 hal 64

22 Van Mater dan Van Horn. *The policy implementation proses*. Dalam Abdul Wahab, Solichin. *Analisa kebijakan publik : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : Bumi Angkasa. 2015 hal 65

Dan untuk melaksanakan program tersebut, terdapat tiga pilar aktivitas.

Yaitu :²³

- 1) Pengorganisasian, pembentukan dan penataan sumber daya, unit-unit kerja dan menentukan metode yang digunakan untuk menjalankan program tersebut.
- 2) Interpretasi, adalah aktifitas menafsirkan program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat agar dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat.
- 3) Aplikasi, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang sesuai dengan tujuan program.

Menurut Brian W. Hogwood dan A.gunn, terdapat beberapa syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, yaitu :²⁴

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius. Beberapa implementasi kebijakan biasanya terhambat oleh sesuatu yang diluar kendali para pembuat kebijakan dan diluar wewenang para penanggung jawabnya. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya bersifat fisik, seperti kemarau panjang dan bencana alam. Dan ada pula yang bersifat politis, seperti kebijakan tersebut ditentang oleh kelompok kepentingan atau tidak disepakati oleh stacholder.

²³ Charles, O. Jhones. *Pengantar kebijakan publik*. Dalam Rahmad, Arif. *Kebijakan pendidikan pendidikan : analisa dinamikan formulasi dan implementas*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2010. Hal 106

²⁴ Abdul Wahab, Solichin. *Analisa kebijakan publik : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : Bumi Angkasa. 2015 hal 167

- 2) Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai. Karena ditakutkan dengan harapan pencapaian tujuan tanpa diiringi dengan ketersediaan waktu dan sumber yang cukup akan membuat program tersebut gagal.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia. Terdapat hubungan yang harmonis antar pihak yang terkait dalam program tersebut dan segala sesuatu yang berhubungan dengan program tersebut.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Artinya, sebelum membuat suatu kebijakan harus benar-benar memahami persoalan yang akan ditanggulangi, sebab terjadinya permasalahan, cara pemecahannya, sifat masalah, dan lain-lain.
- 5) Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit manta rantai penghubungnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keretakan didalamnya dan tidak terjadi masalah yang komplek dalam implementasinya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Karena implementasi yang sempurna menuntut hanya ada satu badan pelaksana agar tujuan dapat tercapai maksimal. Ataupun jika harus melibatkan badan lain, maka harus memiliki hubungan ketergantungan yang sangat minimal.

- 7) Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Semua pihak yang terlibat dalam program tersebut harus benar-benar memahami dan sepakat dengan tujuan yang hendak dicapai dan keadaan ini harus bertahan selama program diimplementasikan.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Artinya terdapat pembagian tugas yang jelas dan terarah agar tidak terjadi kesukaran atau kejanggalan dalam implementasinya.
- 9) Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Untuk mencapai sebuah tujuan, koordinasi dan komunikasi amat diperlukan. Karena banyak kegagalan disebabkan kurangnya kedua hal tersebut.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Artinya, harus ada kondisi ketundukan yang penuh dari siapapun yang terkait dalam program dan apabila terdapat penolakan, maka harus segera diidentifikasi. Dalam kata lain yang memiliki wewenang membuat kebijakan harus yang memiliki kekuasaan.

Proses implementasi kebijakan merupakan tahap penentu keberhasilan atau kegagalan sebuah program. Dan hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :²⁵

²⁵ Rahmad, Arif. *Kebijakan pendidikan pendidikan : analisa dinamikan formulasi dan implementas*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2010. Hal 115

- 1) Faktor rumusan kebijakan. Menyangkut rumusan kalimat dan tujuan dalam kebijakan jelas atau tidak, mudah atau sulit dilaksanakan, dan lain-lain.
 - 2) Faktor personalia pelaksana kebijakan. Menyangkut tingkat pendidikan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, dan kemampuan untuk bekerjasama dari para pelaksana kebijakan.
 - 3) Faktor system organisasi pelaksana kebijakan. Menyangkut jaringan system, kewenangan tiap pemegang peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasi, aturan main dalam organisasi, target tiap-tiap tahap yang telah ditetapkan, model monitoring dan evaluasi kebijakan.
- Subarsono (2008:89) menjabarkan beberapa teori dari para ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu :²⁶

1. Teori George C. Edward

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus

²⁶ Nurdine, Asrul, Skripsi “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar” (Universitas Hasanuddin tahun 2013) hal 42

dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

d. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan

implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b) Derajat perubahan yang diinginkan.
- c) Kedudukan pembuat kebijakan.
- d) (Siapa) pelaksana program.
- e) Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor

implementasi, serta kondisi- kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Dalam implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan. Monitoring dilakukan pada saat kebijakan diimplementasikan, dan evaluasi dilakukan pada saat kebijakan telah selesai diimplementasikan.

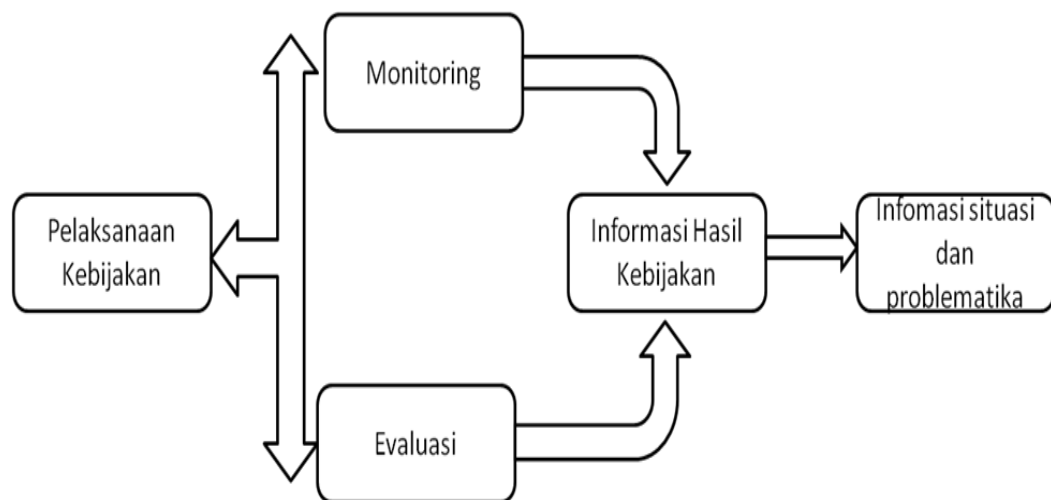
Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan. Tujuan monitoring adalah :²⁷

- a. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- b. Menemukan kesalahan sedini mungkin untuk mengurangi resiko yang lebih besar.
- c. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan jika diperlukan.

Evaluasi kebijakan secara umum adalah proses pengumpulan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkan dengan kriteria, standart, dan indikator. Sedangkan evaluasi kebijakan secara khusus adalah proses penilaian terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.

Pada tahun 2004, Dunn menggambarkan tentang keterkaitan antara monitoring dan evaluasi kebijakan sebagai berikut :²⁸

²⁷ Habullah, M, Haji. *Kebijakan pendidikan : dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2015 hal 110



Implementasi kebijakan pendidikan adalah proses yang menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan program baik secara langsung maupun tidak, bukan hanya program yang menyangkut perilaku-perilaku badan administrative pembuat kebijakan dan ketaatan bagi pelaksana atau penerima kebijakan.²⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan terutama kebijakan pendidikan menurut ali imron (1996 : 70), adalah :³⁰

- 1) Kompleksitas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Semakin kompleks suatu kebijakan yang dibuat, maka semakin rumit dan lama implementasinya.

²⁸ Habullah, M, Haji. *Kebijakan pendidikan : dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2015 hal 112

²⁹ Charles, O. Jhones. *Pengantar kebijakan publik*. Dalam Rahmad, Arif. *Kebijakan pendidikan pendidikan : analisa dinamikan formulasi dan implementas*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2010. Hal 106

³⁰ Rahmad, Arif. *Kebijakan pendidikan pendidikan : analisa dinamikan formulasi dan implementas*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2010. Hal 115

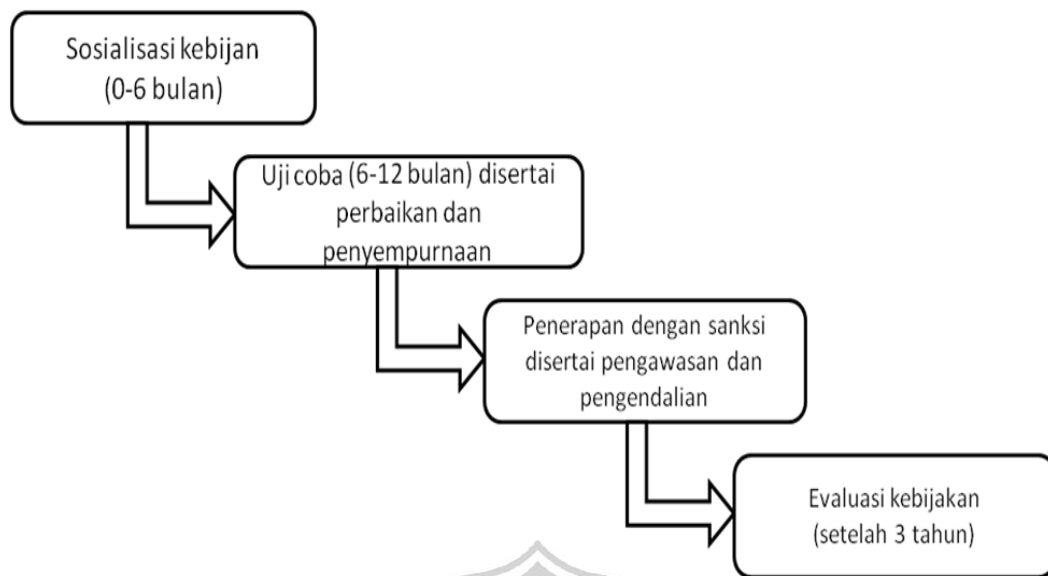
- 2) Ketidak jelasan rumusan kebijakan dan pemecahan masalah yang diajukan. Ketidak jelasan ini akan berdampak pada tindakan pelaksana kebijakan ragu dan takut untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- 3) Sumber potensial pendukung kebijakan. Berkaitan dengan ketersediaan sumber potensial (manusia atau non manusia).
- 4) Keahlian pelaksana kebijakan. Semakin profesional pelaksana kebijakan maka implementasinya akan semakin baik atau sesuai dengan tujuan.
- 5) Dukungan dari sasaran terhadap kebijakan. Dukungan dari masyarakat sangat mempengaruhi implementasi kebijakan karena kebijakan dibuat untuk seluruh masyarakat dengan karakteristik yang beragam.
- 6) Efektifitas dan efisiensi birokrasi. Faktor ini akan berimbas pada dukungan masyarakat. Karena ketika efektifitas dan efisiensi birokrasi buruk maka dukungan masyarakat akan kebijakan menjadi rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MEN-PAN) No.PER/04/M-PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kerja, Dan Revisi Kebijakan Publik Dilingkungan Lembaga Pemerintah Pusat Dan Daerah, langkah-

langkah dalam mengimplmentasikan kebijakan khususnya kebijakan pendidikan adalah :³¹

- 1) Penyiapan implementasi kebijakan pendidikan (0-6 bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijakan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau birokrasi atau masyarakat. Tahapan sosilaisasi dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta sosialisasi secara langsung dengan masyrakat.
- 2) Implemntasi kebijakan pendidikan dilakukan tanpa sanksi (masa uji coba) dengan jangka waktu selama 6-12 bulan dengan disertai perbaikan dan penyempurnaan kebijakan.
- 3) Implemntasi kebijakan pendidikan dilakukan dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai dengan disertai pengawasan dan pengendalian.
- 4) Evaluasi kebijakan pendidikan setelah 3 tahun masa berlaku.

³¹ Habullah, M, Haji. *Kebijakan pendidikan : dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2015 hal 100



Dalam melaksanakan monitoring diperlukan data dan informasi yang dapat diperoleh dengan berbagai metode, antara lain :³²

- a. Metode dokumentasi, yaitu bersumber dari data, laporan kegiatan, laporan tahunan atau sejenisnya.
- b. Metode observasi, yaitu dengan mengamati kejadian dilapangan guna meyakinkan dalam proses memberikan penilaian monitoring dan evaluasi.
- c. Metode wawancara, yaitu proses Tanya jawab dengan pembuat kebijakan seputar implementasi kebijakan.
- d. Forum Group Discussion (FGD) adalah kegiatan pertemuan dan diskusi dengan para pembuat kebijakan dari berbagai lini.

Dan implementasi kebijakan pendidikan adalah alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program dan pelayanan yang diterapkan. Tujuan evaluasi kebijakan pendidikan adalah :³³

³² Habullah, M, Haji. *Kebijakan pendidikan : dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2015 hal 116

- a. Mengkaji sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya.
- b. Memberikan panduan kepada para pelaksana kebijakan pendidikan mengenai kelncaran implementasi kebijakan.
- c. Menyediakan indicator penting (masukan) untuk pembuatan kebijakan dimasa yang akan datang.
- d. Menentukan tingkat kinerja kebijakan.
- e. Mengukur tingkat efisensi dan efektifitas kebijakan.
- f. Mengetahui manfaat dan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan.

Dan ciri-ciri dalam evaluasi kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut :³⁴

- a. Tujuannya menentukan hal-hal yang strategis untuk menentukan kinerja kebijakan pendidikan.
- b. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan pelaksana kebijakan, dan target kebijakan pendidikan.
- c. Prosedur dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Evaluasi mencakup formulasi, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan pendidikan.
- e. Penilainya bersifat objektif.

Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan pendidikan terdapat kreteria yang dirumuskan kedalam indicator-indikator berikut :³⁵

³³ Habullah, M, Haji. *Kebijakan pendidikan : dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2015 hal 118

³⁴ Habullah, M, Haji. *Kebijakan pendidikan : dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2015 hal 119

³⁵ Habullah, M, Haji. *Kebijakan pendidikan : dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2015 hal 119

- a. Aspek hasil, melihat seberapa jauh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten selama implementasi kebijakan oleh para implementator.
- b. Aspek hasil, mengetahui sejauhmana pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan.

A.4 Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Autos dan Namos. Autos adalah sendiri dan Namos adalah aturan Undang-Undang. Sehingga dapat diartikan sebagai suatu kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah memiliki pengertian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Dan Otonomi Daerah menurut Philip Mahwood merupakan hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan

kepentingan mereka masing-masing dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.³⁶

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷ Kewenangan pemerintah daerah mencakup semua bidang pemerintahan kecuali :

- 1) politik luar negeri
- 2) pertahanan
- 3) keamanan
- 4) yustisi
- 5) moneter dan fiskal nasional
- 6) agama.

Dan didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 juga menyebutkan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah :

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota

³⁶ <http://www.markijar.com/2016/07/otonomi-daerah-lengkap-pengertian-dasar.html> pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 17.00

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6

- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sedangkan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Otonomi daerah memiliki tujuan untuk :³⁸

- 1) Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik.
- 2) Memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.
- 3) Meringankan beban pemerintah pusat.

38 <http://alisabeladr.blogspot.com/2011/11/otonomi-daerah.html> pada tanggal 16 juli 2018 pukul 08.00

- 4) Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah.
- 5) Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan daerah.
- 6) Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antardaerah untuk menjaga keutuhan NKRI.
- 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 8) Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yaitu :³⁹

- 1) Asas kepastian hukum yaitu asas yang mementingkan landasan peraturan perUndang-Undangan dan keadilan dalam penyelenggaraan suatu negara.
- 2) Asas tertip penyelenggara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian serta keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- 3) Asas kepentingan umum yaitu asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif mengenai penyelenggara negara dengan tetap

³⁹ <http://alisabeladr.blogspot.com/2011/11/otonomi-daerah.html> pada tanggal 16 juli 2018 pukul 08.00

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- 5) Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 6) Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- 7) Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi suatu negara sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- 8) Asas efisiensi dan efektifitas yaitu asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Adapun tiga asas otonomi daerah yang meliputi:⁴⁰

- 1) Asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI.
- 2) Asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.

⁴⁰ <http://alisabeladr.blogspot.com/2011/11/otonomi-daerah.html> pada tanggal 16 juli 2018 pukul 08.00

- 3) Asas tugas pembantuan, adalah penugasan oleh pemerintah kepada daerah dan oleh daerah kepada desa dalam melaksanakan tugas tertentu dengan disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang berwenang.

Adapun Kekurangan dan kelebihan adanya sistem otonomi daerah diantaranya :

a. Kelebihan

- 1) Pemerintah Prov/Kab/Kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan.
- 2) Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah maka pembangunan di daerah tersebut akan maju, berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.
- 3) Daerah dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya, PAD dengan membentuk Perda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi.
- 4) Pemerintah daerah bersama rakyat di daerah itu akan bersama-sama membangun daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama.

b. Kekurangan/kerugian

- 1) Pemda ada yg mengatur daerahnya dengan menetapkan Perda yang bertentangan dengan peraturan yg lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan di daerah.
- 2) Kalau kontrol/pengawasan pemerintah pusat lemah, maka besar peluangnya untuk munculnya raja-raja kecil yg berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa.
- 3) Bila terjadi permasalahan di daerah, misalnya KKN, maka bukan hanya pemda yg disalahkan, akan tetapi pemerintah pusat akan kena getahnya (kurang pengawasan).
- 4) Peraturan yg ditetapkan pemerintah pusat, kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi daerah tertentu, sehingga menimbulkan multi tafsir yang dapat merugikan pemda dan rakyat di daerah itu.

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan No 21 Tahun 2012 Tentang Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Diploma III Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2012-2015 ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model Merilee S. Grindle. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dua variabel, yaitu:

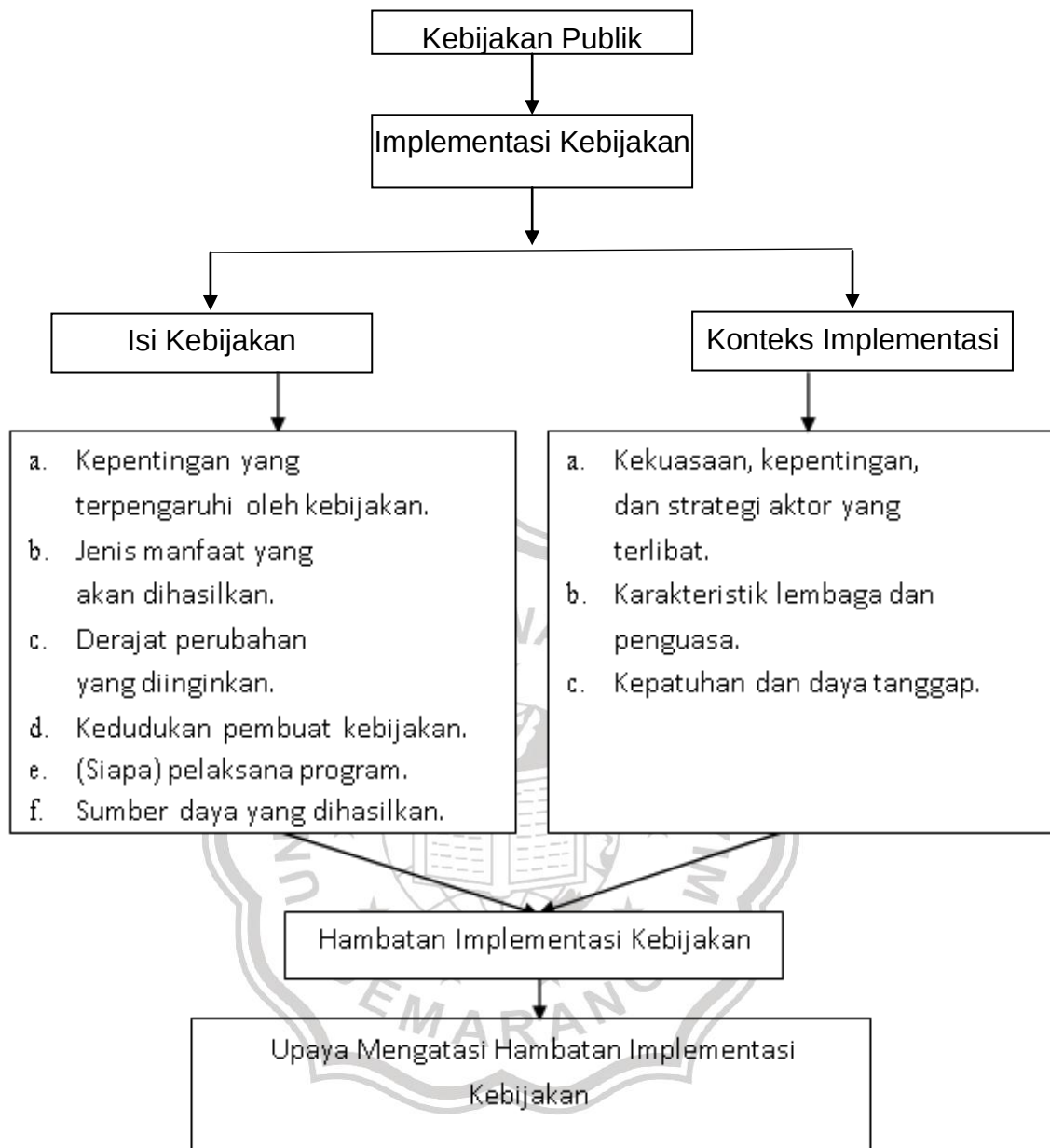
1) Isi kebijakan, meliputi:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuat kebijakan.
- e) pelaksana program.
- f) Sumber daya yang dihasilkan.

2) Konteks implementasi, meliputi:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Dari evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui indikator tersebut dapat diketahui bagaimana pelaksanaan/implementasi Kebijakan dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan.



F. Metode Penelitian

F.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, factual dan akurat mengenai objek yang diselidiki dimana hasil diskriptif dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail.⁴¹

Metode kualitatif menurut Creswell adalah suatu pendekatan atau penelurusan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral dilakukan dengan cara mewawancarai peserta penelitian (sample) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh peserta penelitian kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis dan hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema.⁴²

Dari data-data tersebut peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya, peneliti membuat permenungan pribadi (self-reflection) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan

41 Zainuddin Masyhuni, *Metode Penelitian: pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : Refika Aditama..2008. Hal 12

42 Raco, Jr.*Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010 Hal 7

tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap penelitian kualitatif agak bias karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data.

F.2 Lokasi Penelitian

Penelitian Ini Dilakukan Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

F.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan (Field Research)⁴³ secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui langsung masalah yang akan dibahas, dalam penelitian skripsi ini, Peneliti akan mencari data dari informan-informan terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa dokumentasi yang berupa teks atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini

43 Alamsyah, Syahrul. skripsi: “*analisis implementasi kebijakan program pendidikan Gratis di desa bontotanga kec. Bontotiro kab. Bulukumba*”(universitas islam negeri alauddin Makassar 2013) hal. 22

atau data yang bersumber dari kepustakaan (library Study)⁴⁴. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui studi dokumenter terkait dengan penelitian ini pada berbagai literatur baik berupa buku, dokumen, makalah maupun dari internet.

F.4 Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-secara lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan para informan. Wawancara dilakukan dengan secara mendalam dan terbuka, data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya, melalui komunikasi aktif dari pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (*interviewer*) dan akan ditanggapi oleh yang diwawancarai (*interviewee*).

b. Metode Studi Kepustakaan (Penalaran Dokumentasi Tertulis)

Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian

44 Alamsyah, Syahrul skripsi: “*analisis implementasi kebijakan program pendidikan Gratis di desa bontotanga kec. Bontotiro kab. Bulukumba*”(universitas islam negeri alauddin Makassar 2013) hal. 22

serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁵

Atau Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴⁶

F.5 Informan Penelitian

Informan Penelitian menurut Moleong adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dan Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.⁴⁷

Adapun informan penelitian dipenelitian ini adalah :

- 1) Kepala Dinas/Sekretaris/Pegawai Pendidikan dan Kebudayaan Kab Way Kanan Provinsi Lampung
- 2) Mahasiswa penerima beasiswa DIII perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

⁴⁵ Zainuddin Masyhuni, *Metode Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : Refika Adiatma. 2008. Hal 35

⁴⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2000 Cet. 2, hal 280

⁴⁷ <http://milmanyusdi.blogspot.com/2009/11/metodologi-penelitian-bab-iii.html> pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 8.23

F.6 Metode Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menata data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi yang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (interpretasi).⁴⁸

Selanjutnya analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan lebih bersifat deskriptif analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara menyeluruh dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Diploma III Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung terdiri dari empat bab yaitu :

- 1) BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustakan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- 2) BAB II Gambaran Umum lokasi Penelitian, yaitu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

48 Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin. 1996. h. 104

- 3) BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.
- 4) BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



